

Transformasi organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara

Djaka Permana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=75628&lokasi=lokal>

Abstrak

BAKN dengan kondisi internalnya yang mencakup struktur dan bentuk organisasinya, peran & fungsinya serta kinerja aparaturnya, dikaitkan dengan pengaruh faktor lingkungan yang selalu berubah, sudah waktunya organisasi BAKN dirubah secara holistik guna menjadi suatu organisasi yang memiliki kemampuan bersaing. Sehingga perlu dilakukan persiapan baik terhadap faktor internal maupun eksternal untukantisipasi transformasi organisasi BAKN. Pokok masalah dalam tesis ini, ialah faktor-faktor apa yang diperlukan untuk transformasi organisasi BAKN ?. Penelitian dilakukan dengan disain deskriptif analitis, serta pendekatan yang digunakan, kualitatif, dengan tehnik dan instrumen wawancara tidak berstruktur terhadap 13 orang key informan. Selain itu dilakukan pula kajian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan, BAKN belum melakukan persiapan secara nyata untukantisipasi transformasi. Dari internal, 100% key informans menyatakan harus dipersiapkan unsur-unsur yang diperiukan untuk transformasi organisasi BAKN yang tercakup dalam faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti misalnya, struktur & bentuk organisasi yang landai/ramping, menyusun dan mensosialisasikan visi, dijabarkan ke dalam misi dan strategi BAKN sehingga proses pekerjaan dapar berjalan dengan lancar dan berorientasi kepada pelayan terhadap kebutuhan PNS; peran BAKN dilaksanakn secara proaktif dengan fungsi yang mengarah kepada pengembangan s.d.m. aparatur; untuk peningkatan produktivitas dilakukan pengembangan s.d.m., menegakkan etika profesi, dan memperbaiki tingkat kesejahteraan. Dari aspek eksternal, dipersiapkan ketentua yang mengatur kedudukan, tugas & fungsi BAKN yang sejiwa dengan UU Pemerintah Daerah dalam bidang kepegawaian. Unsur penting lainnya, sistem informasi manajemen yang menunjang tugas pekerjaan BAKN yang baru.

Merubah secara holistik BAKN menjadi BKN (Badan Kepegawaian Negara) dengan struktur organisasi berbentuk datar, dan desentralistik, serta berperan proaktif, merupakan saran selain perlu diterbitkan UU tentang Kepegawaian yang baru sebagai landasan hukum pembentukan BKN.